

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik ekonomi maupun sosial. Seperti yang terdapat dalam Todaro (2013:28), menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1012: 65) Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikkan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Kata kunci dari

pembangunan adalah pembentukan modal, karena untuk mencapai target pembangunan yang tinggi pada suatu negara dibutuhkan nilai investasi yang besar. Sehingga strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi (Kuncoro, 2012:4). Selain itu, kebutuhan akan investasi yang besar dapat diperoleh juga melalui dorongan kondisi negara yang sudah lebih baik terutama sistem pelayanan serta sarana dan prasarana yang mendukung. Namun demikian tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi yang mendukung. Sebab pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensi yang berbeda (Arsyad, 2013:147). Dalam intensi pertumbuhan yang berbeda, pelaksanaan pembangunan sering mengalami perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak dengan efektivitas dan pemerataan dipihak lain (Dumairy, 2012:56). Dari hal tersebutlah, pelaksanaan pembangunan tidak jarang menciptakan adanya ketimpangan.

Di Indonesia sejak tahun 2000 dapat dikatakan berhasil dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, seperti yang terlihat dalam Tabel I-1,

Tabel 1-1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Perkembangan Penanaman Modal Bidang Industri di Indonesia Tahun

Tahun	PDB Riil (milyar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PMD		PMA	
			Jumlah Proyek	Rencana Investasi (juta RP)	Jumlah Poyek	Rencana Investasi (ribuUS\$)
2010			12	3.282	27	41.790
2011	4.820,5	-	116	28.347	37	84.862
2012	5.182,0	7,50	228	83.557	64	119.63
2013	5.544,7	7,00	234	108.502	65	229.09
2014	6.067,2	9,42	38	170.704	53	132.92
2015	6.753,4	11,31	33	282.214	81	357.04
2016	7.269,0	7,63	23	212.094	63	822.46
2017	7.630,8	4,98	12	175.799	35	119.43
2018	8.156,3	6,89	61	252.994	10	35.618
Jumlah			1.7	1.317.493	446	1.960.8

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN RI

Berdasarkan Tabel I-1, menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi, yaitu mencapai 7,50 % pada tahun 2012. Meskipun pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur mengalami penurunan. Adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi ternyata juga disertai dengan peningkatan perencanaan penanaman modal dalam bidang industri baik PMA atau PMDN pada tahun 2012.

Selama masa orde baru (1966-1998) pemerintah memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Terbukti dari adanya tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 21,32% yang merupakan pertumbuhan sektor tertinggi dari tahun 1983-1987 (Nota Keuangan dan RAPBN, 1990:641). Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan tidak mempertimbangkan kondisi dan potensi pada masing-masing daerah, di mana rata-rata Sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan daerah, pada tahun

2001 pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan alasan, bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak semuanya bisa diterapkan di seluruh daerah, daerah yang memiliki daya dukung dan sesuai dengan kriteria kebijakan nasional akan dengan mudah menyerap peluang pembangunan, sedangkan daerah yang tidak sesuai kriteria kebijakan nasional akan mengalami perlambatan dalam pembangunan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan optimalisasi pembangunan akan terjadi. Di mana kebijakan pembangunan ini disesuaikan dengan potensi dan permasalahan daerah.

Adanya otonomi daerah sebagai sistem kerja pemerintah Indonesia, diharapkan kebijakan ini juga dapat memberikan kemudahan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (daerah di sini terutama kabupaten dan kota), pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan masyarakatnya bekerja pada sektor agraris dan berpendidikan rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya berimbas pada tingkat nasional tidak serta pada tingkatan daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar kawasan di Indonesia.

pekerjaan serta peningkatan kesetaraan kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan. Selain itu, ada beberapa keuntungan kebijakan otonomi daerah menurut (Suparmoko, 2012:19), pertama adalah sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masing-masing masyarakat, kedua adalah pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap

kebutuhan masyarakatnya sendiri, ketiga adalah dengan adanya otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Provinsi Sumatera Utara memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik, namun disertai dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Oleh karena itu menarik untuk diketahui bagaimana kondisi sebenarnya pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, sehingga penelitian ini berjudul “Penerapan Indeks Williamson Untuk Mengukur Ketimpangan Regional Di Provinsi Sumatera Utara”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk memperjelas dari masalah yang akan dibahas dalam melakukan penelitian. Identifikasi masalah merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengetahui permasalahan yang muncul dan harus diatasi atau diminimalisir.

Setelah melakukan observasi awal pada data-data sekunder yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara maka dapat diperoleh informasi tentang permasalahan yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam katagori pesat, namun kebijakan pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten dan Kota tidak berjalan secara efektif.

2. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara masih terbilang rendah, dimana penduduk dengan lulusan SD masih lebih banyak dibandingkan penduduk lulusan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
3. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penelitian ini, maka peneliti memberi batasan masalah yaitu: “Analisis Indeks Williamson Untuk Mengukur Ketimpangan Regional Di Provinsi Sumatera Utara”

2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu berapa besar ketimpangan regional yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara serta kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meminimalisasi ketimpangan regional tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi sebagai akibat adanya pembangunan, dan sampai sejauh mana ketimpangan pada akhirnya menimbulkan dampak negatif.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara apakah termasuk dalam kategori moderat atau konservatis.

3. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai ketimpangan ekonomi regional ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perencanaan pembangunan antar wilayah.
2. Sebagai bahan tambahan referensi dalam penelitian lanjutan yang disesuaikan dengan bidangnya.
3. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah.